



**INDONESIA**INDICATOR

---

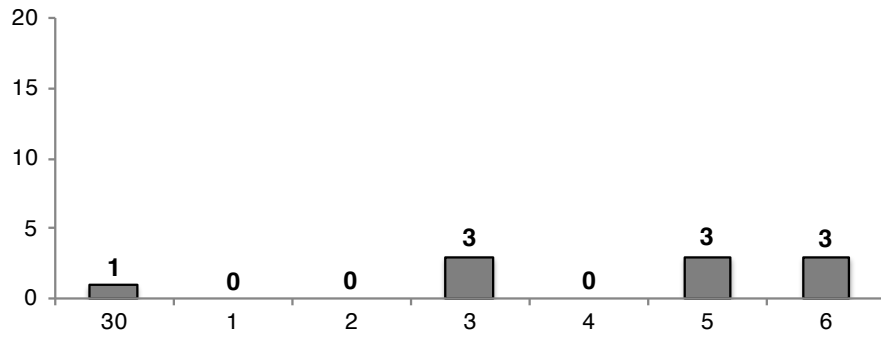
# **LAPORAN MEDIA CETAK**

**Wakil Gubernur Jawa Tengah  
(06 Mei 2025)**

## Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
1	3	3	0	0

## Daily Statistic



## Media Share

-

## Influencers

-

## Table Of Contents : 06 Mei 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	06 Mei 2025	Jateng Pos	Ahmad Luthfi Jadikan kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat	1	Positive	Ahmad Luthfi
2	06 Mei 2025	Jateng Pos	Gubernur Larang Pungutan Sekolah di SMA dan SMK Negeri	12	Positive	Ahmad Luthfi
3	06 Mei 2025	Jateng Pos	Pemprov Jateng dan Zurich Fondation Tandatangani MoU Kawasan Pesisir Terpadu	12		

Title	Ahmad Luthfi Jadikan kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat		
Media	Jateng Pos	Reporter	Adv/ucl
Date	2025-05-06	Tone	Positive
Page	1	PR Value	




## Ahmad Luthfi Jadikan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat

**SEMARANG** - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi membuka Kantor Gubernur sebagai rumah rakyat. Hal ini untuk mendekatkan layanan dan mempermudah layanan masyarakat.

"Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengadukan segala permasalahan-permasalahan yang ada," kata Luthfi saat meluncurkan Kantor Gubernur Rumah Rakyat pada Senin, 5 Mei 2025.

Ia mengatakan, rumah rakyat ini merupakan simbol kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan aktual, merumuskan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

"Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur pelayanan publik di tempat kita," kata Luthfi.

Layanan di Rumah Rakyat dibuka di lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dengan waktu pelayanan untuk Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 WIB, dan pada Jumat pukul 07.00-14.00 WIB.

Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari Kantor Gubernur, dapat datang di masing-masing kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) seperti Bakorwil Solo untuk Eks Karesidenan Soloraya, Bakorwil Pati untuk Eks Karesidenan Pati, dan Bakorwil Banyumas untuk Eks Karesidenan Banyumas.

Selain itu, masyarakat juga



**RESMI MEMBUKA:** Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, resmi membuka Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai Rumah Rakyat.

dapat mengadukan permasalahan yang ada di sekitarnya secara online. Melalui website [ppid.jatengprov.go.id](http://ppid.jatengprov.go.id) dan dinas-dinas terkait, juga nomor WhatsApp 08112773393. Layanan secara online ini terbuka 1x24 jam.

Seluruh Dinas juga sudah diinstruksikan untuk menanggapi aduan dengan cepat, sehingga aduan masyarakat bisa tertangani.

"Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau online boleh. Kita siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota," jelas Luthfi.

Melalui Rumah Rakyat tersebut, rencananya juga akan digelar dialog bersama Gubernur dan Wakil Gubernur setiap sebulan sekali dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Misalnya pada saat launching, digelar dialog dengan topik pendidikan sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional.

"Guru, siswa, orangtua dan siapa pun boleh mengadu tentang permasalahan-permasalahan. Hari berikutnya nanti bisa nelayan, petani, dan siapa pun," jelasnya. (adv/ucl)

Title	Gubernur Larang Pungutan Sekolah di SMA dan SMK Negeri		
Media	Jateng Pos	Reporter	jan
Date	2025-05-06	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Wagub Jateng Taj Yasin di acara launching kantor gubernur rumah rakyat, Senin 5 Mei 2025.

HUMAS/JATENGPOS

# Gubernur Larang Pungutan Sekolah

## Di SMA dan SMK Negeri, Kalau Ada Laporkan

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tidak ada lagi pungutan yang ditarik oleh SMA Negeri di Jawa Tengah. Sebab seluruh kegiatan pendidikan sudah ditangani oleh pemerintah.

"Di SMA sudah tidak ada pungutan karena P5 sudah nggak berlaku," katanya usai dialog terkait masalah pendidikan yang digelar di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 5 Mei 2025. Luthfi menjelaskan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016

dijelaskan bahwa komite sekolah tidak boleh memungut atau meminta pembiayaan dari orangtua murid. Komite sekolah hanya boleh menerima sumbangan sukarela atau tanpa paksaan dari orangtua murid untuk mendukung kegiatan pendidikan.



AHMAD LUTHFI  
(Gubernur Jateng)

"Kita ada Permendikbud nomor 75. Orangtua siswa boleh menyumbang

tetapi Komite Sekolah tidak boleh memungut atau meminta. Pembiayaan sudah ditangani oleh BOS, BOSDA, dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia juga meminta kepada Komite Sekolah untuk mensosialisasikan hal itu dengan baik kepada orangtua atau wali murid.

Luthfi dengan tegas menyatakan bahwa apabila masih ada sekolah yang meminta atau menarik biaya atau pungutan kepada orangtua/wali murid agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

"Untuk itu kalau memang ada SMA Negeri yang masih menarik biaya atau pungutan segera laporkan kita. Akan kita evaluasi," tegas Mantan Kapolda

Jateng itu.

Sebelumnya, dalam dialog di Rumah Rakyat tersebut, salah seorang guru dari SMAN 1 Semarang, Laksono, mengadu kepada Gubernur Ahmad Luthfi tentang pembiayaan sekolah dari orangtua murid. Terutama terkait pembiayaan kegiatan P5 pada kurikulum merdeka yang belum tercover oleh BOS dan lainnya.

"Sumbangan sukarela banyak kendala. Kepala sekolah sering dilaporkan pungli. Dana BOS tidak mencukupi. Bagaimana menjembatani agar komite dan orangtua murid punya satu persepsi yang sama," katanya kepada Ahmad Luthfi. (\*/jan)

Title	Pemprov Jateng dan Zurich Fondation Tandatangani MoU Kawasan Pesisir Terpadu		
Media	Jateng Pos	Reporter	*
Date	2025-05-06	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

# Pemprov Jateng dan Zurich Foundation Tandatangani MoU Kawasan Pesisir Terpadu



Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen di acara MoU penanganan kawasan Pesisir Pantura.

**SEMARANG** – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Zurich Foundation melalui Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA), serta Mercy Corps

Indonesia (MCI) menandatangani kerja sama Memorandum of Understanding (MoU), di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Senin, Mei 2025. Kerja sama itu akan

menggarap proyek pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Direktur Eksekutif MCI, Ade Soekadis, mengatakan, proyek jangka panjang membangun ketahanan iklim hingga 2035 itu menyasar wilayah hulu dan hilir. Agenda tersebut akan digarap sejumlah wilayah kabupaten/kota di Jateng. Mulai dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

“Jateng unik, dampak penurunan muka tanah dari Kabupaten Brebes-Jepara di mana banyak desa tenggelam. Di hilir ada rob dan banjir bandang, sebagian areanya bahkan banyak jadi genangan permanen. Ini hal yang mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, kami pilih Jateng untuk pekerjaan ini,” kata dia.

Ade bilang, penurunan muka

tanah (land subsidence) di Pantura Jateng pemicu abrasi menjadi isu penting skala global. Maka, kata dia, perlu pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim. Proyek ini dilakukan dengan tiga pendekatan.

Pertama, memperkuat kebijakan global dan nasional terkait banjir di pesisir dan genangan pesisir permanen. Kedua, mendorong pembangunan berketahanan iklim yang efektif di tingkat nasional. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat terdampak banjir di Pantura Jateng.

Khusus pada poin ketiga yakni pemberdayaan masyarakat, Ade bilang, pekerjaan akan fokus untuk membuat mata pencaharian alternatif di wilayah yang terdampak abrasi. Contoh di Pekalongan, telah membuat percontohan permodalan keramba apung pada sektor perikanan di lahan abrasi.

“Salah satunya keramba apung yang tentunya bisa adaptasi akan naik turunnya pasang surut air laut. Pendekatan lain di Semarang, atau Demak bisa berbeda. Kita mencari mata pencaharian yang adaptif dan berkelanjutan supaya masyarakat tetap bisa mencari pemasukan secara ekonomi,” katanya.

Kemudian pendekatan ketahanan iklim di wilayah hulu, yakni memberi solusi pertanian yang mengutamakan konservasi lahan. Di antaranya menggunakan pupuk organik, dan menambahkan tanaman yang akarnya bisa menahan potensi tanah longsor, dan banjir bandang.

Dia mencontohkan pemberdayaan petani itu telah dilakukan di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Petani didorong melakukan budidaya tanaman yang lebih konservatif sehingga tak berikan dampak buruk terhadap

lingkungan.

Wakil Gubernur Jateng, **Taj Yasin**, memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proyek tersebut sehingga Jateng bisa menjadi percontohan. Diharapkannya, hal itu akan menjadi bukti nyata dalam membuat pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim.

Pihaknya menggarisbawahi bila perhatian besar juga mengatasi dari sisi hulunya. Maka perbaikan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti Kupang, Babon, Tuntang, dan lainnya yang menuju ke wilayah hilir di Pantura.

“Selaras dengan program infrastruktur, Pemprov Jateng akan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota. Dari pusat kebawah harus sinkron. Seperti (banjir dan rob) di Kabupaten Demak itu perlu pemikiran intens,” katanya. (\*)